



Catatan Atas **LAPORAN KEUANGAN**

(Audited)

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya

PPS Belawan dan PPN Sibolga adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan PPS Belawan dan PPN Sibolga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kontribusi semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan ini, khususnya PPS Belawan dan PPN Sibolga sehingga dapat diperoleh data dan informasi secara lengkap. Kami berharap Laporan ini dapat dijadikan langkah menuju pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel (good governance).

Medan, 6 Mei 2026

PPS Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Belawan,



Moh. Salim

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan Laporan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	38
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
F. Pengungkapan Penting Lainnya	47
VI. Lampiran dan Daftar	



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN**

JALAN GABION – BELAWAN SUMATERA UTARA
TELEPON (061) 6941016, FAKSIMILE (061) 6940329
LAMAM www.kkp.go.id SUREL pps.belawan@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 05.06.03/PPSB.KPA/TU.110/V/2026

Penggabungan Laporan Keuangan PPS Belawan dan PPN Sibolga tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 31 Desember 2025 (Audited) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Medan, 6 Mei 2026

Pt. Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Belawan,



Moh. Salim

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan PPS Belawan dan PPN Sibolga Tahun 31 Desember 2025 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.767.579.390 atau mencapai 168 persen dari estimasi sebesar Rp3.432.078.000. Realisasi Belanja Negara pada TA 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah sebesar Rp28.151.357.768 atau mencapai 92 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp30.486.104.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp236.927.671.513 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp282.836.640; Aset Tetap (neto) sebesar Rp233.606.149.568; Properti Investasi (neto) sebesar Rp1.694.091.845; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.344.593.460. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.407.808.121 dan Rp234.519.863.392.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/ defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.855.966.271, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp34.371.534.440 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp30.515.568.169. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp344.329.721 dan Defisit Pos Luar Biasa sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp30.171.238.448.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp241.836.572.632 dikurang Defisit-LO sebesar Rp30.171.238.448 kemudian ditambah koreksi senilai Rp152.447.080 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp22.702.082.128 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp234.519.863.392.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TINGKAT WILAYAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catt.	2025				2024
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	%	REALISASI
Pendapatan Negara Dan Hibah						
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	3.432.078.000	5.767.579.390	2.335.501.390	168	4.092.857.852
Jumlah Pendapatan dan Hibah		3.432.078.000	5.767.579.390	2.335.501.390	168	4.092.857.852
Belanja	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	17.943.824.000	17.874.158.226	(69.665.774)	100	17.167.039.091
Belanja Barang dan Jasa	B.4	11.215.120.000	9.404.186.397	(1.810.933.603)	84	14.677.001.094
Belanja Modal	B.5	1.327.160.000	873.013.145	(454.146.855)	66	2.374.813.741
Jumlah Belanja		30.486.104.000	28.151.357.768	(2.334.746.232)	92	34.218.853.926



Plt. Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Belawan,

Moh. Salim

II. NERACA

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN NERACA TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian Akun	Ctt.	2025	2024
Aset			
Aset Lancar	C.1		
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.1	259.874.116	147.463.607
Piutang Bukan Pajak	C.1.2	521.983	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.3	(2.609)	-
Persediaan	C.1.4	22.443.150	15.898.000
Jumlah Aset Lancar		282.836.640	163.361.607
Aset tetap	C.2		
Tanah	C.2.1	154.465.221.000	154.465.221.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	38.498.146.471	38.134.392.826
Gedung dan Bangunan	C.2.3	36.278.402.863	35.743.036.863
Jalan, Irigasi Dan Jaringan	C.2.4	123.130.612.758	123.130.612.758
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	347.789.000	347.789.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	23.088.000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(119.137.110.524)	(112.531.506.860)
Jumlah Aset Tetap		233.606.149.568	239.289.545.587
Properti Investasi	C.3		
Properti Investasi	C.3.1	2.119.490.000	2.119.490.000
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.3.2	(425.398.155)	(377.142.681)
Jumlah Properti Investasi		1.694.091.845	1.742.347.319
Aset Lainnya	C.4		
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.1	55.416.233	37.760.000
Aset Lain-lain	C.4.2	5.409.990.113	5.067.488.613
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	(4.120.812.886)	(3.717.037.061)
Jumlah Aset Lainnya		1.344.593.460	1.388.211.552
JUMLAH ASET		236.927.671.513	242.583.466.065

KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	127.038.422	145.817.641
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.2	2.280.769.699	601.075.792
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.407.808.121	746.893.433
Kewajiban Jangka Panjang	C.6		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		2.407.808.121	746.893.433
EKUITAS			
Ekuitas	C.7	234.519.863.392	241.836.572.632
JUMLAH EKUITAS		234.519.863.392	241.836.572.632



Plt. Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Belawan,

Moh. Salim

III. LAPORAN OPERASIONAL

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catt.	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Bukan Pajak	D.1	3.855.966.271	4.662.027.372
JUMLAH PENDAPATAN		3.855.966.271	4.662.027.372
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	17.873.688.743	17.170.191.691
Beban Persediaan	D.3	145.687.170	379.231.040
Beban Barang dan Jasa	D.4	6.767.710.592	8.566.089.674
Beban Pemeliharaan	D.5	1.836.685.439	2.603.432.426
Beban Perjalanan Dinas	D.6	611.070.094	3.114.568.696
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	7.136.689.793	9.736.793.055
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	D.8	2.609	-
JUMLAH BEBAN		34.371.534.440	41.570.306.582
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(30.515.568.169)	(36.908.279.210)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		344.329.681	(14.971.328.500)
Pendapatan Pelepasan Aset		344.329.681	282.769.000
Beban Pelepasan Aset		-	15.254.097.500
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		40	12.090.497
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		40	12.090.497
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9	344.329.721	(14.959.238.003)
RPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(30.171.238.448)	(51.867.517.213)
POS LUAR BIASA	D.10		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
JUMLAH POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/ (DEFISIT) - LO		(30.171.238.448)	(51.867.517.213)



Dit. Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Belawan,

Moh. Salim

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 31
 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catt.	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	241.836.572.632	263.828.585.412
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(30.171.238.448)	(51.867.517.213)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4	152.447.080	358.174.406
KOREKSI LAIN-LAIN	E.5	-	15.763
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		152.447.080	358.190.169
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.6	22.702.082.128	29.517.314.264
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(7.316.709.240)	(21.992.012.780)
EKUITAS AKHIR	E.7	234.519.863.392	241.836.572.632



Plt. Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Belawan,

Moh. Salim

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan sebagai Koordinator Wilayah Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaporan pada tingkat wilayah yang diharapkan kualitas pelaporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- Melaksanakan pembinaan berkelanjutan terhadap terhadap Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang tingkat Wilayah;
- Mengembangkan sistem pendukung yang profesional dan terpercaya;
- Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur Perhubungan.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan tingkat kemiskinan 0%, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan fokus pada misi Asta Cita ke-2: Swasembada pangan dan ekonomi biru

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah:

- a. Menjamin kelestarian sumber daya ikan melalui penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan pengawasan berbasis wilayah pengelolaan.
- b. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha penangkapan ikan melalui pemanfaatan teknologi, modernisasi armada, dan integrasi sistem logistik hasil tangkapan.
- c. Mengembangkan infrastruktur pelabuhan perikanan sebagai simpul layanan terpadu dan pusat pertumbuhan ekonomi kelautan.

- d. Memperkuat kelembagaan, perlindungan, dan pemberdayaan nelayan, termasuk nelayan kecil, perempuan, dan pemuda, untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing.
- e. Meningkatkan tata kelola perikanan tangkap yang transparan dan akuntabel, melalui penguatan regulasi, perizinan, pemantauan, serta sistem data dan informasi perikanan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan UAPPA-W *Audited* Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) melalui Modul Aset dan Modul GL dan Pelaporan. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar

pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Audited TA 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip dasar-dasar konvensi-konvensi aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W). Disamping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) adalah sebagai berikut:

Pendapatan - LRA

1) Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan - LO

2) Pendapatan – LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada PPS Belawan dan PPN Sibolga adalah sebagai berikut: Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan..

Beban

4) Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar; Aset Tetap; dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca, Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/ atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal, Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah); Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: Tanah; Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tata Cara Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum Tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya	4 Tahun

*Piutang Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya, Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa

manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum Tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 Tahun
Franchise	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 Tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman	20 Tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi	50 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 Tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

f. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

g. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LRA

Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satker dibawah lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 30.486.104.000. Selama tahun 2025 dilakukan revisi atas DIPA Awal Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yang disebabkan adanya Refocussing, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1		
Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2025		
(dalam Rupiah)		
Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	3.432.078.000	3.432.078.000
Jumlah Pendapatan	3.432.078.000	3.432.078.000
Belanja		
Belanja Pegawai	15.219.761.000	17.943.824.000
Belanja Barang dan Jasa	13.138.068.000	11.215.120.000
Belanja Modal	876.505.000	1.327.160.000
Jumlah Belanja	29.234.334.000	30.486.104.000

Realisasi Pendapatan Rp5.767.579.390

B.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Hibahs

Realisasi Pendapatan Bukan Pajak dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.767.579.390 atau mencapai 168,05 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.432.078.000. Pendapatan di satuan kerja lingkup PPS Belawan dan PPN Sibolga terdiri dari ; Kelompok Akun Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, Dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN ; Kelompok Akun Pendapatan Jasa Lainnya ; Kelompok Akun Pendapatan Lain-Lain . Rincian jumlah pendapatan dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2			
Rincian Estimasi dan Realisasi PNB dan Hibah TA 2025			
(dalam Rupiah)			
Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan Bmn, Iuran Badan Usaha, Dan Penerimaan Klaim Asuransi Bmn	1.252.465.000	3.391.398.542	271
Pendapatan Jasa Lainnya	2.179.613.000	2.376.180.808	109
Pendapatan Lain-Lain	-	40	(100)
Jumlah	3.432.078.000	5.767.579.390	168

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami kenaikan 40,92 persen dibandingkan TA 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh ; peningkatan penjualan dan pengelolaan BMN sebesar 201,84 persen ; penurunan Pendapatan Jasa Lainnya sebesar 19,57 persen; peningkatan Pendapatan Denda sebesar 100 persen ; penurunan Pendapatan Lain-Lain sebesar 100 persen. Untuk rincian pendapatan dapat dilihat pada Perbandingan Realisasi PNB dan Hibah TA 31 Desember 2025 dan TA 31 Desember 2024 dibawah ini.

Tabel 3			
Perbandingan Realisasi PNB dan Hibah TA 2025 dan TA 2024			
(dalam Rupiah)			
Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Pendapatan Jasa Layanan Umum	-	1.123.569.562	(100,0)
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan Bmn, Iuran Badan Usaha, Dan Penerimaan Klaim Asuransi Bmn	3.391.398.542	-	100,0
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	-	2.954.415.625	(100,0)
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi Dan Informatika	-	2.782.168	(100,0)
Pendapatan Jasa Lainnya	2.376.180.808	12.090.497	19.553,3
Pendapatan Lain-Lain	40	-	100,0
Jumlah	5.767.579.390	4.092.857.852	40,9

Realisasi Belanja
Rp28.151.357.76
8

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp28.151.357.768 atau 92,34 persen dari anggaran belanja sebesar Rp30.486.104.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4			
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2025			
(dalam Rupiah)			
Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	17.943.824.000	17.881.341.610	99,65
Belanja Barang dan Jasa	11.215.120.000	9.404.186.397	83,85
Belanja Modal	1.327.160.000	873.013.145	65,78
Total Belanja Kotor	30.486.104.000	28.158.541.152	92,37
Pengembalian	-	7.183.384	-100,00
Belanja Pegawai	-	7.183.384	-100,00
Jumlah	30.486.104.000	28.151.357.768	92,34

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar minus 17,73 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar 4,12 persen disebabkan karena meningkatnya jumlah pegawai mutasi/pindah di tahun ini dibandingkan dengan tahun yang lalu.

Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan sebesar 35,93 persen disebabkan karena terkena dampak penghematan anggaran.

Belanja Modal mengalami penurunan sebesar 63,24 persen disebabkan karena karena terkena dampak penghematan anggaran.

Tabel 5			
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan TA 2024			
(dalam Rupiah)			
Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Pegawai	17.874.158.226	17.167.039.091	4,12
Belanja Barang dan Jasa	9.404.186.397	14.677.001.094	(35,93)
Belanja Modal	873.013.145	2.374.813.741	(63,24)
Jumlah	28.151.357.768	34.218.853.926	(17,73)

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp17.874.158.226

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp17.874.158.226 dan Rp17.167.039.091. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja periode ini mengalami penurunan sebesar 1,02 persen disebabkan karena meningkatnya jumlah pegawai mutasi/pindah di tahun ini dibandingkan dengan tahun yang lalu.

Tabel 6			
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024			
(dalam Rupiah)			
Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.609.067.204	6.678.182.138	(1,0)
Belanja Gaji Pokok PPPK	2.758.145.639	2.357.282.951	17,0
Belanja Lembur	215.145.000	109.236.000	97,0
Belanja Tunjangan Khusus dan	8.298.983.767	8.030.305.798	3,3
Jumlah Belanja Kotor	17.881.341.610	17.175.006.887	4,1
Pengembalian Belanja	7.183.384	7.967.796	(9,8)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.481.807	1.997.241	224,5
Belanja Gaji dan Tunjangan	296.027	-	100,0
Belanja Gaji Pokok PPPK	-	605	(100,0)
Belanja Honor	405.550	-	100,0
Belanja Tunjangan Khusus dan	-	5.969.950	(100,0)
Jumlah Belanja	17.874.158.226	17.167.039.091	4,1

*Realisasi Belanja
Barang
Rp9.404.186.397*

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.404.186.397 dan Rp14.677.001.094. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 35,93 persen dari Realisasi Belanja Barang periode sebelumnya. Hal ini disebabkan perubahan akumulasi belanja, sebagai berikut:

Belanja Barang Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 33,84 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena pada tahun ini terdapat blokir/penghematan anggaran dibandingkan tahun lalu.

Belanja Barang Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 43,09 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena pada tahun ini terdapat blokir/penghematan anggaran dibandingkan tahun lalu.

Belanja Barang Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 62,28 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena pada tahun ini terdapat blokir/penghematan anggaran dibandingkan tahun lalu.

Belanja Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 8,8 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena pada tahun ini terdapat blokir/penghematan anggaran dibandingkan tahun lalu.

Belanja Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 8,8 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena pada tahun ini terdapat blokir/penghematan anggaran dibandingkan tahun lalu.

Belanja Perjalanan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 28,64 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena pada tahun ini terdapat blokir/penghematan anggaran dibandingkan tahun lalu.

Tabel 7			
Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024			
(dalam Rupiah)			
Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Barang Operasional	1.747.916.172	2.641.792.473	(33,84)
Belanja Barang Non Operasional	589.403.615	1.035.697.851	(43,09)
Belanja Persediaan	162.595.120	431.099.490	(62,28)
Belanja Jasa	4.466.826.257	4.897.809.999	(8,80)
Belanja Pemeliharaan	1.826.322.639	2.559.387.776	(28,64)
Belanja Perjalanan	1.826.322.639	2.559.387.776	(28,64)
Belanja Barang untuk Diserahkan Kemasyarakatan	-	3.117.674.217	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	10.619.386.442	17.242.849.582	(38,4)
Pengembalian Belanja	-	6.460.712	(100,00)
Belanja Barang Operasional	-	3.355.191	(100,00)
Belanja Perjalanan	-	3.105.521	(100,00)
Total Belanja Barang	10.619.386.442	17.236.388.870	(38,39)

Realisasi Belanja
Modal
Rp873.013.145

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp873.013.145 dan Rp2.374.813.741. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada periode ini mengalami kenaikan sebesar 63,24 persen dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada tahun ini terdapat blokir/penghematan anggaran pada belanja modal dibandingkan tahun lalu.

Tabel 8			
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024			
(dalam Rupiah)			
Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	849.925.145	1.463.511.740	(41,9)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.088.000	493.706.001	(95,3)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	417.596.000	(100,0)
Jumlah Belanja Kotor	873.013.145	2.374.813.741	(63,2)
Jumlah Belanja Modal	873.013.145	2.374.813.741	(63,2)

Realisasi Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp849.925.145

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp849.925.145 dan Rp1.463.511.740. Belanja Modal Peralatan Mesin mengalami penurunan sebesar 41,93 persen bila dibandingkan dengan realisasi periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada tahun ini terdapat blokir/penghematan anggaran pada belanja modal. Rincian Belanja dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 31 Desember 2025 dan TA 31

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Pompa	-	20.457.150	(100,0)
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	113.179.999	134.490.000	(15,8)
Kendaraan Bermotor Khusus	-	40.000.000	(100,0)
Perkakas Kons Logam Terpasang	7.614.600	28.359.000	(73,1)
Peralatan Bengkel Khusus Peladam	-	1.600.000	(100,0)
Alat Penyimpan Hasil Percobaan	49.150.000	-	100,0
Alat Penyimpan Perlengkapan	-	80.752.783	(100,0)
Alat Kantor Lainnya	35.323.655	276.655.290	(87,2)
Meubelair	-	109.179.267	(100,0)
Alat Pembersih	3.900.000	-	100,0
Alat Pendingin	4.995.000	47.060.250	(89,4)
Alat Rumah Tangga Lainnya (	58.667.558	155.808.050	(62,3)
Peralatan Studio Audio	8.250.000	-	100,0
Peralatan Studio Video Dan Film	33.966.000	28.000.000	21,3
Peralatan Studio	34.965.000	11.124.000	214,3
Alat Komunikasi Telephone	13.020.356	20.636.000	(36,9)
Alat Komunikasi Digital dan	-	23.997.000	(100,0)
Sumber Tenaga	-	2.538.350	(100,0)
Alat Komunikasi Lainnya	30.919.000	-	100,0
Alat Kedokteran Bedah	-	3.600.000	(100,0)
Alat Laboratorium Proses	-	16.500.000	(100,0)
Alat Laboratorium Pertanian	-	82.065.600	(100,0)
Komputer Jaringan	149.850.066	33.350.000	349,3
Personal Komputer	291.963.911	249.424.000	17,1
Peralatan Mini Komputer	-	9.140.000	(100,0)
Peralatan Personal Komputer	14.160.000	88.775.000	(84,0)
Jumlah	849.925.145	1.463.511.740	(41,9)

Realisasi Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp23.088.000

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp23.088.000 dan Rp493.706.001. Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar 95,32 persen bila dibandingkan dengan realisasi periode sebelumnya disebabkan karena pada tahun ini terdapat blokir/penghematan anggaran pada belanja modal gedung dan bangunan. Rincian Belanja dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Bel. Modal Gedung TA 31 Desember 2025 dan TA 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (Perencanaan Gedung Administrasi PPN Sibolga)	11.544.000		100,0
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (Perencanaan Pagar Keliling Pasca Bencana PPN	11.544.000		100,0
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (Rehab Kantor Syahbandar PPS Belawan)		65.300.000	(100,0)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Pembuatan Canopy Bongkar Ikan pada Gedung Netloft PPN		189.930.751	(100,0)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Pengawas Pembuatan Canopy Bongkar Ikan pada Gedung Netloft		11.627.250	(100,0)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Pelataran Parkir pada Gedung Netloft PPN Sibolga)		99.936.000	(100,0)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Perencana Pelataran Parkir pada Gedung Netloft PPN Sibolga)		9.990.000	(100,0)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Pengawas Pelataran Parkir pada Gedung Netloft PPN Sibolga)		12.000.000	(100,0)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (Rehab Gedung TPI Higienis PPN Sibolga)		104.922.000	(100,0)
Jumlah	23.088.000	493.706.001	(95,32)

Realiasi Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0

B.5.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp417.596.000. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami kenaikan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan realisasi periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada tahun ini terdapat blokir/penghematan anggaran pada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Rincian Belanja dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 10

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 31 Desember 2025 dan TA 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Penambahan Nilai JU (Peningkatan Jalan Akses Menuju Area Demaga SPDN PPN Sibolga)		223.353.000	(100,0)
Belanja Penambahan Nilai JU (Peninggian Jalan Pintu Gerbang Utama PPN Sibolga)		183.243.000	(100,0)
Belanja Penambahan Nilai JU (Pengawas Peninggian Jalan Pintu Gerbang Utama)		11.000.000	(100,0)
Jumlah	-	417.596.000	(100,0)

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset lancar
Rp282.538.156

C.1. ASET LANCAR

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp282.836.640 dan Rp163.361.607. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Pendapatan yang masih harus diterima
Rp259.874.116

C.1.1. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp259.874.116 dan Rp147.463.607. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak pemerintah per tanggal neraca tetapi belum diterima pembayarannya. Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Transaksi PYMHD PPS Belawan per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.757.800 terdiri atas:
 - Jasa tambat sebesar Rp 6.653.643 dan
 - Tagihan listrik bulan Desember 2025 kepada pihak stakeholder/pengguna jasa sebesar Rp 104.157.
2. Transaksi PYMHD PPN Sibolga per 31 Desember 2025 sebesar Rp 253.116.316 terdiri atas:
 - Jasa tambat dan jasa kebersihan kolam pelabuhan sebesar Rp239.043.870.

- Tagihan listrik bulan Desember 2025 kepada pihak stakeholder/pengguna jasa sebesar Rp 9.280.515.
- Tagihan air bulan Desember 2025 kepada pihak stakeholder/pengguna jasa sebesar Rp 3.481.831.
- Jasa IPAL bulan Desember 2025 sebesar Rp1.319.100.

Piutang Bukan Pajak Rp521.983

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing masing adalah sebesar Rp521.983 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10			
Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan per 31			
(dalam Rupiah)			
Keterangan	2025	2024	%
Piutang Lainnya	521.983	-	100,00
Jumlah	521.983	-	100,00

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Rp2.609

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.609 dan Rp0 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 11			
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31			
(dalam Rupiah)			
Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar		0,5%	
Kurang Lancar		10%	
Diragukan		50%	
Macet		100%	
Jumlah	-		(2.609)

Persediaan
Rp22.443.150

C.1.4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/ atau untuk dijual, dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 31 Desember 2024 masingmasing adalah sebesar Rp22.443.150 dan Rp15.898.000, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 12			
Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024			
(dalam Rupiah)			
Persediaan	2025	2024	%
Barang Konsumsi	21.379.650	13.686.000	56,2
Bahan Untuk Pemeliharaan	1.063.500	2.212.000	(51,9)
Jumlah	22.443.150	15.898.000	41,2

C.2. ASET TETAP

Aset Tetap
Rp233.606.149.568

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp233.606.149.568 dan Rp239.289.545.587. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap akan dijelaskan pada sebagai berikut:

C.2.1. Tanah

Tanah
Rp154.465.221.000

Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 31 Desember 2024 masingmasing adalah sebesar Rp154.465.221.000 dan Rp154.465.221.000 Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut

Tabel 13	
Rincian Mutasi Tanah TA 2025	
(dalam Rupiah)	
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	154.465.221.000
Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	154.465.221.000

Nilai tanah tahun 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan

Peralatan dan
Mesin

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Rp38.498.146.47
1

Peralatan dan Mesin yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 31 Desember 2024 masingmasing adalah sebesar Rp38.498.146.471 dan Rp38.134.392.826 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 14	
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin TA 2025	
(dalam Rupiah)	
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	38.134.392.826
Mutasi Tambah	861.255.145
Pembelian	849.925.145
Transfer Masuk	11.330.000
Mutasi Kurang	(497.501.500)
Penghentian dan Penggunaan	(497.501.500)
Saldo Per 31 Desember 2025	38.498.146.471
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	34.229.671.030
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	4.268.475.441

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada lampiran.

Gedung dan
Bangunan

Rp36.051.426.86
3

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 31 Desember 2024 masingmasing adalah sebesar Rp36.278.402.863 dan Rp35.743.036.863 Mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 15	
Rincian Gedung dan Bangunan TA 2025	
(dalam Rupiah)	
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	35.743.036.863
Mutasi Tambah	5.186.926.000
Reklasifikasi Masuk	4.878.536.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung dan KDP)	308.390.000
Mutasi Kurang	(4.651.560.000)
Reklas Keluar	(4.651.560.000)
Saldo Per 31 Desember 2025	36.278.402.863
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	7.061.078.853
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	29.217.324.010

Mutasi Tambah:

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp4.878.536.000 bersumber dari transaksi Pengembangan Rumah negara Golongan I dan II Tipe B Permanan.

Pengembangan Nilai Aset (Langsung dan KDP) sebesar Rp308.390.000 bersumber dari transaksi KDP Rehab Guest House pada satker PPS Belawan.

Mutasi Kurang:

Reklas Keluar sebesar Rp4.651.560.000 bersumber dari transaksi Pengembangan Rumah negara Golongan II Tipe A Permanan pada satker PPS Belawan dan Rumah Negara Golongan I Tipe A, D Permanen dan Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen.

*Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp123.130.612.758*

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 31 Desember 2024 masingmasing adalah sebesar Rp123.130.612.758 dan Rp123.130.612.758. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 16	
Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025	
(dalam Rupiah)	
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	123.130.612.758
Mutasi Tambah	-
Saldo Per 31 Desember 2025	123.130.612.758
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	77.846.360.641
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	45.284.252.117

*Aset Tetap Lainnya
Rp347.789.000*

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 31 Desember 2024 masingmasing adalah sebesar Rp347.789.000 dan Rp347.789.000 Mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 16	
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya TA 2025	
(dalam Rupiah)	
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	347.789.000
Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang	-
Saldo Per 31 Desember 2025	347.789.000
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	347.789.000

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp23.088.000

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp23.088.000 dan Rp0 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

Tabel 17	
Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2025	
(dalam Rupiah)	
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	0
Mutasi Tambah	23.088.000
Perolehan/Penambahan KDP	23.088.000
Mutasi Kurang	(308.390.000)
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(308.390.000)
Saldo Per 31 Desember 2025	(285.302.000)

Mutasi Tambah:

Perolehan/Penambahan KDP sebesar Rp23.088.000 bersumber dari transaksi KDP Gedung dan Bangunan yaitu perencanaan gedung administrasi dan perencanaan pagar keliling akibat bencana dengan masing-masing senilai Rp 11.544.000.

Mutasi Kurang

Reklas KDP menjadi barang jadi sebesar sebesar Rp308.390.000 bersumber dari transaksi KDP Rehab Guest House pada satker PPS Belawan.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp119.137.110.524

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp119.137.110.524 dan Rp112.531.506.860.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025.

Tabel 18			
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2025			
(dalam Rupiah)			
Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	38.498.146.471	34.229.671.030	4.268.475.441
Gedung dan Bangunan	36.278.402.863	7.061.078.853	29.217.324.010
Jalan, Irigasi Dan Jaringan	123.130.612.758	77.846.360.641	45.284.252.117
Aset Tetap Lainnya	23.088.000	-	23.088.000
Jumlah	197.930.250.092	119.137.110.524	78.793.139.568

Properti Investasi
Rp2.119.490.000

C.3.1. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti Investasi yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing masing adalah sebesar Rp2.119.490.000 dan Rp2.119.490.000 Mutasi Properti Investasi adalah sebagai berikut:

Tabel 19	
Properti Investasi TA 2025	
(dalam Rupiah)	
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	2.119.490.000
Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang	-
Saldo Per 31 Desember 2025	2.119.490.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	425.398.155
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	1.694.091.845

*Akumulasi
Penyusutan
Properti Investasi
Rp425.398.155*

C.3.2. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp425.398.155 dan Rp377.142.681.

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

*Aset Lainnya
Rp1.344.593.460*

C.4. ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya PPS Belawan dan PPN Sibolga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.344.593.460 dan Rp1.388.211.552.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada PPS Belawan dan PPN Sibolga terdiri dari sebagai berikut:

*Dana Yang
dibatasi
Penggunaannya
Rp55.416.233*

C.4.1. Dana Yang dibatasi Penggunaannya

Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp55.416.233 dan Rp37.760.000. Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan dana satuan kerja yang berada pada Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA), hal ini timbul sebagai akibat dari pekerjaan yang belum selesai atau belum diserahterimakan. Pengelolaan RPATA diatur dalam PMK No.109 Tahun 2023.

*Aset Lain-lain
Rp5.409.990.113*

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp5.409.990.113 dan Rp5.067.488.613. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional PPS Belawan dan PPN Sibolga serta dalam proses penghapusan. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 20	
Rincian Mutasi Aset Lain-Lain TA 2025	
(dalam Rupiah)	
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	5.067.488.613
Mutasi Tambah	497.501.500
Reklas Masuk	497.501.500
Mutasi Kurang	(155.000.000)
Penghapusan	(155.000.000)
Saldo Akhir	5.409.990.113

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi tambah:

- Reklas masuk sebesar Rp497.501.500 terdiri dari Reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke Aset lainnya yang berubah status dari rusak berat menjadi anti guna sebesar Rp342.501.500 pada satker PPN Sibolga; dan transaksi sebesar Rp155.000.000 pada satker PPS Belawan

Mutasi kurang:

- Penghapusan sebesar Rp155.000.000 bersumber dari transaksi peralatan dan mesin berupa penghapusan kendaraan dinas roda empat pada satker PPS Belawan.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp4.120.812.886*

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp4.120.812.886 dan Rp5.067.488.613. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 21			
Rincian Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2025			
(dalam Rupiah)			
Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
Aset Lain-Lain	5.409.990.113	4.120.812.886	5.409.990.113
Jumlah	5.409.990.113	4.120.812.886	5.409.990.113
Total	5.409.990.113	4.120.812.886	1.289.177.227

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp2.407.808.121*

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek PPS Belawan dan PPN Sibolga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.407.808.121 dan Rp746.893.433.

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp127.038.422*

C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp127.038.422 dan Rp145.817.641. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 22	
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2025	
(dalam Rupiah)	
Uraian	Jumlah
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	71.622.189
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	55.416.233
Total	127.038.422

*Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp2.280.769.699*

C.5.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.280.769.699 dan Rp601.075.792. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Tabel 23		
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka TA 2025		
(dalam Rupiah)		
Uraian	Jumlah	Keterangan
Pendapatan Sewa Diterima di Muka	1.241.102.970	Satker PPS Belawan
Pendapatan Sewa Diterima di Muka	807.955.424	Satker PPN Sibolga
Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	81.947.551	Satker PPS Belawan
Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	149.763.754	Satker PPN Sibolga
Total	2.280.769.699	

Ekuitas
Rp234.519.863.392

C.6. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp234.519.863.392 dan Rp241.836.572.632. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB
Rp3.855.966.271

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.855.966.271 dan Rp4.662.027.372. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 24			
Rincian Pendapatan PNPB TA 2025 dan TA 2024			
(dalam Rupiah)			
Uraian	2025	2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	127.520.206	41.022.780	210,9
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.235.818.342	1.634.523.613	(24,4)
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	2.492.627.723	2.983.698.811	(16,5)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	2.782.168	(100,0)
Jumlah	3.855.966.271	4.662.027.372	(17,3)

Beban Pegawai
Rp17.873.688.74
3

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp17.873.688.743 dan Rp17.170.191.691. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 25			
Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan TA 2024			
(dalam Rupiah)			
Uraian	2025	2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	4.669.681.700	4.751.538.900	(1,7)
Beban Pembulatan Gaji PNS	66.454	65.146	2,0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	329.050.126	338.609.040	(2,8)
Beban Tunj. Anak PNS	101.366.545	105.943.734	(4,3)
Beban Tunj. Struktural PNS	57.970.000	61.110.000	(5,1)
Beban Tunj. Fungsional PNS	358.629.100	339.926.000	5,5
Beban Tunj. PPh PNS	39.867.332	38.738.257	2,9
Beban Tunj. Beras PNS	247.459.140	258.611.820	(4,3)
Beban Uang Makan PNS	683.145.517	657.714.850	3,9
Beban Tunjangan Umum PNS	114.880.000	125.400.000	(8,4)
Beban Gaji Pokok PPPK	1.836.620.900	1.585.835.400	15,8
Beban Pembulatan Gaji PPPK	32.878	32.080	2,5
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	130.741.390	106.080.800	23,2
Beban Tunjangan Anak PPPK	37.785.564	29.804.226	26,8
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	231.440.000	221.360.000	4,6
Beban Tunjangan Beras PPPK	127.748.880	105.153.840	21,5
Beban Uang Makan PPPK	381.600.000	309.191.150	23,4
Beban Tunjangan Umum PPPK	11.880.000	-	100,0
Beban Uang Lembur	116.679.000	78.822.000	48,0
Beban Uang Lembur PPPK	98.466.000	30.414.000	223,8
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	5.856.957.767	5.906.067.341	(0,8)
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2.441.620.450	2.119.773.107	15,2
Saldo	17.873.688.743	17.170.191.691	4,1

**Beban
Persediaan
Rp145.687.170**

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp145.687.170 dan Rp379.231.040. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 26			
Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan TA 2024			
(dalam Rupiah)			
Uraian	2025	2024	%
Beban Pers. konsumsi	145.687.170	379.231.040	(61,6)
Saldo	145.687.170	379.231.040	(61,6)

**Beban Barang
dan Jasa Rp
Rp6.767.710.592**

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp6.767.710.592 dan Rp8.566.089.674. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Secara keseluruhan terjadi penurunan Beban Barang dan Jasa pada PPS Belawan dan PPN Sibolga. Perubahan ini diantaranya bersumber dari penurunan Beban Keperluan Perkantoran, penurunan Beban Penambah Daya Tahan Tubuh, kenaikan Beban Honor Operasional Kegiatan, penurunan Beban Langganan Litrik serta kenaikan dan penurunan beban lainnya. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 31 Desember 2025 dan TA 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 27			
Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan TA 2024			
(dalam Rupiah)			
Uraian	2025	2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	1.423.598.142	2.185.282.744	(34,9)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	11.999.830	55.233.493	(78,3)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.153.700	8.604.070	(51,7)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	214.510.000	197.178.000	8,8
Beban Barang Operasional Lainnya	93.654.500	192.138.975	(51,3)
Beban Bahan	286.438.431	754.017.341	(62,0)
Beban Honor Output Kegiatan	9.050.000	41.877.500	(78,4)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	293.915.184	239.803.010	22,6
Beban Langganan Listrik	796.915.921	1.050.519.511	(24,1)
Beban Langganan Telepon	2.067.852	3.924.478	(47,3)
Beban Langganan Air	356.422.290	547.169.530	(34,9)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	279.627.554	245.728.316	13,8
Beban Jasa Konsultan	76.874.000	99.803.009	(23,0)
Beban Sewa	7.200.000	255.006.757	(97,2)
Beban Jasa Profesi	18.000.000	27.325.000	(34,1)
Beban Jasa Lainnya	2.893.283.188	2.662.477.940	8,7
Saldo	6.767.710.592	8.566.089.674	(21,0)

Beban Pemeliharaan
Rp1.836.685.439

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.836.685.439 dan Rp2.603.432.426. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 28			
Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan TA 2024			
<i>(dalam Rupiah)</i>			
Uraian	2025	2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	779.306.864	999.290.424	(22,0)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	37.864.428	114.976.261	(67,1)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	720.509.792	1.030.294.220	(30,1)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	74.813.000	86.557.000	(13,6)
Beban Pemeliharaan Irigasi	60.349.850	57.491.000	5,0
Beban Pemeliharaan Jaringan	153.478.705	271.528.871	(43,5)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	10.362.800	43.294.650	(76,1)
Saldo	1.836.685.439	2.603.432.426	(29,5)

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp611.070.094*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp611.122.594 dan Rp3.114.568.696. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh meningkatnya frekuensi perjalanan

Tabel 29			
Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan TA 2024			
<i>(dalam Rupiah)</i>			
Uraian	2025	2024	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	529.892.758	2.221.969.301	(76,2)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.250.000	61.380.000	(67,0)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.850.000	132.850.000	(84,3)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	40.077.336	698.369.395	(94,3)
Saldo	611.070.094	3.114.568.696	(80,4)

**Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp7.136.689.793**

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp7.136.689.793 dan Rp9.736.793.055. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 31 Desember 2025 dan TA 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 30			
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan TA 2024			
(dalam Rupiah)			
Uraian	2025	2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.538.817.690	2.525.593.534	(39,1)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	849.642.964	853.933.104	(0,5)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2.004.635.290	2.010.080.190	(0,3)
Beban Penyusutan Irigasi	2.529.614.753	4.129.442.484	(38,7)
Beban Penyusutan Jaringan	104.449.297	107.309.297	(2,7)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lain-Lain	61.274.325	62.178.972	(1,5)
Saldo	7.136.689.793	9.736.793.055	(26,7)

**Beban
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Rp2.609**

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.609 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 31			
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TA 2025 dan TA 2024			
(dalam Rupiah)			
Uraian	2025	2024	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	2.609	-	100,0
Saldo	2.609	-	100,0

Kegiatan Non
Operasional
Rp344.329.721

D.9. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah surplus pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp344.329.721 dan minus Rp14.959.238.003. Rincian pendapatan dan beban dari kegiatan non operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 32			
Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan TA 2024			
(dalam Rupiah)			
Uraian	2025	2024	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	40	4.612.754	(100,0)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	580.000	(100,0)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	6.897.743	(100,0)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	344.329.681	282.769.000	21,8
Beban Pelepasan Aset	-	(15.254.097.500)	(100,0)
Saldo	344.329.721	(14.959.238.003)	(102,3)

Kegiatan Pos
Luar Biasa Rp0

D.10. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 31 Desember 2025 dan TA 31 Desember 2024.

Tabel 33			
Rincian Pos Luar Biasa TA 2025 dan TA 2024			
(dalam Rupiah)			
Uraian	2025	2024	%
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-
Saldo	-	-	-

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp241.836.572.632

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp241.836.572.632 dan Rp263.828.585.412.

Defisit LO
Rp30.171.238.448

E.2. Surplus (Defisit) LO

Nilai Defisit-LO pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp30.171.238.448 dan Rp51.867.517.213.

Dampak Kumulatif Perubahan Keb. Akuntansi Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Rp152.447.080

E.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp152.447.080 dan Rp358.174.406.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Dan merupakan peralihan status Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen pada satker PPN Sibolga. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 34	
Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi TA 2025	
(dalam Rupiah)	
Jenis Aset tetap	Jumlah
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	152.447.080
Jalan, Irigasi, Jembatan dan Jaringan	-
Saldo	152.447.080

Koreksi Lain-lain
Rp0

E.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp15.763.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 35	
Rincian Koreksi Lain-Lain TA 2025	
(dalam Rupiah)	
Jenis Koreksi	Jumlah
Penyesuaian SAL BLU	-
Saldo	-

Transaksi Antar
Entitas
Rp22.702.082.128

E.6. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp22.702.082.128 dan Rp29.517.314.264. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 36	
Rincian Transaksi Antar Entitas TA 2025	
(dalam Rupiah)	
Jenis Transaksi	Jumlah
Ditagihkan Ke Entitas Lain	28.151.357.768
Diterima Dari Entitas Entitas Lain	(5.767.579.390)
Transfer Masuk	318.303.750
Saldo	22.702.082.128

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.6.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Nilai Transaksi Ditagihkan Ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp28.151.357.768 dan Rp0.

E.6.2 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Nilai Transaksi Diterima Dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember

2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp5.767.579.390 dan Rp0.

E.6.3 Transfer Masuk

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp318.303.750 dan Rp0. Terdiri dari:

- Transfer masuk dengan perolehan Rp308.390.000 pada Satker PPS Belawan berupa KDP Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan berupa Rehab Guest House pada Satker PPS Belawan sesuai BAST Nomor: KPB.1033/183/DJPT.1/PL.450/V/2025 tanggal 14 Mei 2025.
- Transfer masuk dengan perolehan Rp 9.913.750 pada satker PPN Sibolga berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp11.330.000 dan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.
-

*Ekuitas Akhir
Rp234.519.583.392*

E.7. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp234.519.863.392 dan Rp241.836.572.632.

B. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Pada Satker PPS Belawan sampai tanggal 31 Desember 2025 terdapat 19 kali Revisi DIPA sedangkan Satker PPN Sibolga terdapat 20 kali Revisi DIPA.

F.2. Temuan Dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Sampai tanggal pelaporan tidak ada Temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan/BPKP pada satker PPS Belawan dan PPN Sibolga.

F.3. Rekening Pemerintah

- Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor PPS Belawan adalah Bank Negara Indonesia (Tbk), Kantor Cabang Belawan Nomor 9890394276551000 a.n. Bendahara Pengeluaran Pelabuhan Perikanan Samudera BELAWAN.
- Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor PPN Sibolga adalah Bank Negara Indonesia (Tbk), Kantor Cabang Sibolga Nomor 9890395604011000 a.n. Bendahara Pengeluaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga.

F.4. Pengungkapan Lainnya

- Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.16/PA/2025 Tentang Perubahan Ketujuh Puluh Dua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 4 April 2025 adalah sebagai berikut:

Nama : Ir. Mansur, MM
NIP : 19660312 199103 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda /IVc
Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

Nama : Irvan Armana, S.St.Pi, M.Si
NIP : 19880103 201012 1 003
Pangkat/Gol : Penata Tk.I /IIId
Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

- Adanya pergantian PPK pada satker PPN Sibolga sesuai SK An. Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 14-/KPTS/KPA-PPN.SBG/KU.111/2024, Tanggal 22 April 2024 (Satker PPN Sibolga-560401).
- Terdapat pencatatan atas utang kepada pihak ketiga sebesar Rp106.751.221 dan telah disetorkan ke Kas Negara (Satker PPN Sibolga-560401).
- Terdapat pencatatan atas Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp957.719.178 (Satker PPN Sibolga-560401).
- Terdapat Dana yang dibatasi penggunaannya (Rekening Penampungan) RPATA berupa Honorarium Outsourcing Bulan Desember 2025 oleh penyedia PT. WIRA LESTARI SENTOSA.
- Terdapat pencatatan atas Pendapatan Sewa Diterima Dimuka sebesar Rp1.241.102.970,- (Satker PPS Belawan-427655)
- Terdapat pencatatan atas Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima Dimuka sebesar Rp81.947.551,- (Satker PPS Belawan-427655)
- Terdapat pencatatan atas PYMHD Tahun 2025 sebesar Rp6.757.800,- dan telah disetorkan ke Kas Negara (Satker PPS Belawan-427655)
- Terdapat pencatatan atas Beban yang Masih Harus Dibayar bulan Desember 2025 sebesar Rp20.287.201,- dan telah disetorkan ke Kas Negara (Satker PPS Belawan-427655)
- Terdapat pencatatan atas Piutang lainnya bulan Desember 2025 sebesar Rp222.000,- dan telah disetorkan ke Kas Negara (Satker PPS Belawan-427655)

VI. LAMPIRAN DAN DAFTAR

- ✓ LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
- ✓ NERACA (FACE)
- ✓ LAPORAN OPERASIONAL (LO)
- ✓ LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)
- ✓ NERACA PERCOBAAN AKRUAL SALDO AWAL
- ✓ NERACA PERCOBAAN AKRUAL
- ✓ NERACA PERCOBAAN KAS
- ✓ LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) BELANJA PER AKUN
- ✓ LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PENDAPATAN PER AKUN
- ✓ KERTAS KERJA TELAAH